
Tesis Administrasi Publik

When people should go to the ebook stores, search foundation by shop, shelf by shelf, it is in reality problematic. This is why we give the ebook compilations in this website. It will no question ease you to see guide **Tesis Administrasi Publik** as you such as.

By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If you set sights on to download and install the Tesis Administrasi Publik, it is enormously simple then, since currently we extend the associate to buy and create bargains to download and install Tesis Administrasi Publik therefore simple!

Tesis Administrasi Publik

2022-11-03

MOODY FITZGERALD

Panduan Praktis-Reflektif Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis dan Kualitas Hasil Penelitian Tesis dan Disertasi dalam Ilmu Sosial, Politik dan Komunikasi European Alliance for Innovation

Menjadi istri seorang bhayangkara yang sering berpindah-pindah tempat malah semakin menjadikanku kreatif untuk terus berkarya yang dapat mengisi waktu luang sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan semangat dan tekad yang kuat dibarengi dengan ikhtiar dan doa, aku berusaha melakukan yang terbaik, dari menjadi marketing pembiayaan sekaligus pembelian dan penjualan mobil serta yang lainnya sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi ASN. Peran orangtuaku sangatlah besar dalam menjadikanku seperti saat ini di samping dukungan suami dan anak-anak serta keluargaku. Pada kesempatan ini kupersembahkan semangat hidupku dan

keyakinan Allah akan bersama kita jika kita selalu bersama Allah Swt., hidup ini akan baik jika kewajiban kita pada Allah kita perbaiki Wallahu a'lam... semoga Allah Swt., senantiasa meridai perjalanan hidupku ini Aaammiiin Ya Rabbal Alamin. Buku persembahan penerbit IndieBookcorner

Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik
Zifatama Jawara

This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the International Conference on Environmental Governance held in Makassar, Indonesia. The 67 full papers presented were carefully reviewed and selected from 212 submissions. The papers reflect the conference sessions as follows: ICT and Environmental Sustainability, Electronic Environmental Monitoring, E-Government for Environmental System, Environmental law and politics, Sustainable future for human security, Disaster risk reduction, Climate change and adaptive capacity, Islamic environmental thought, Socio-environmental conflicts, Global environmental change, Sustainable development goals (SDGs),

Ocean policy and governance, Rural development and planning, Forest governance and conservation, Water and soil conservation, Business and CSR, and Urban vulnerability and resilience.

Teori dan Aplikasi Dalam Peningkatan Kinerja Universitas
Brawijaya Press

Buku ini menekankan pada upaya pengkajian terhadap sejarah lengkap asal-usul dan perkembangan studi dan praktik kebijakan publik. Penekanannya lebih kepada keterampilan berpikir, khususnya bagi mahasiswa. Di samping itu, melalui buku ini juga dibahas tipe-tipe analisis dalam kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, buku ini juga dilengkapi dengan beberapa pendekatan dan sejumlah metode analisis yang digunakan dalam mengkaji kebijakan publik. Selain hal tersebut, juga diuraikan tentang landasan dan latar belakang filosofis, sosiologis, dan politis di balik perkembangan kebijakan publik di berbagai kawasan.

Etika Administrasi Publik Universitas Brawijaya Press

Shadow Play Information Politics in Urban Indonesia University of Toronto Press

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN UIN SGD BANDUNG 2018

Shadow Play examines how members of the urban underclass in Indonesia seek to negotiate their rights to urban space in a country undergoing significant social, political, and economic change.

Etika Administrasi Publik Yayasan Pustaka Obor Indonesia

The International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES) is an international conference organized by the Faculty of Law, Universitas Lampung, to be an international scientific forum for

researchers, academics, and practitioners. The first I-COFFEES were held in 2018 at the Novotel Hotel, Bandar Lampung, Indonesia. In 2019, the Second I-COFFEES were held on 5-6 August at the Faculty of Law, Universitas Lampung, Indonesia. "Fundamental Rights" has been chosen for the main theme of the Second I-COFFEES with a focus field on Law and Development, Women and Children, Ethnic and Religion, Law and Public Policy, Local Government, Business Law and Disruption, Pengayoman Law, Village Development and Communal Rights, and International and Human Rights. The conference was attended by national and international delegates from university academics, researchers, and practitioners. In total, there are 71 papers presented, with only 28 papers published.

pengetahuan anggaran, budaya kerja dan transparansi publik
Gramedia Pustaka Utama

Wacana Gender dan Kehutanan Masyarakat secara umum sudah dikenal di masing-masing disiplin ilmu induknya, yakni Ilmu Sosial dan Kehutanan. Bahkan secara tersirat, program-program terkait hal tersebut telah menjadi program pembangunan di masing-masing sektor dengan dukungan wacana pembangunan global (MDGs). melalui buku ini, penulis mencoba mencari benang merah dua wacana tersebut yang notabene keduanya sama-sama sebagai wacana pinggiran di masing-masing sektor. Seperti disiratkan penulis, wacana gender selama ini hanya berkutat di masyarakat (urban maupun pedesaan) dan segala problematika, dari masalah ekonomi, KDRT, trafficking, hingga ke hal pribadi, yakni kesehatan reproduksi. Simak dalam buku ini, |Penerbit Deepublish, Deepublish, |

Proceedings of the 2nd International Conference on Fundamental

Rights, I-COFFEES 2019, 5-6 August 2019, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia Lontar Mediatama

Buku yang tersaji ini adalah hasil pengembangan bahan ajar dan kajian dari literatur-literatur mengenai etika administrasi (birokrasi), Agile governance dan kebijakan Publik. Untuk itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang menggeluti dunia birokrasi pemerintahan dan politik praktis agar tidak menyimpang dari tindakan-tindakan yang tidak bermoral.

Sebuah Perjalanan European Alliance for Innovation
Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini mempunyai arti penting dalam dunia pendidikan. Masyarakat semakin sadar akan kelanjutan menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi, terutama bagi dosen, guru maupun pegawai. Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah Strata Satu (S1) ke jenjang Strata Dua (S2), Strata Dua (S2) ke jenjang Strata Tiga (S3). Faktual dilapangan masih ditemukan mahasiswa semester akhir pada jenjang Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) yang merasakan kegalauan dalam penyusunan tesis dan disertasi. Buku Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) merupakan solusi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pengembangan (Research & Development). Buku ini secara garis besar berisi praperencanaan penelitian, perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan penelitian, serta publikasi penelitian. Buku ini juga memberikan panduan, prosedur serta contoh bagi mahasiswa yang sedang menyusun tesis dan disertasi dari pengalaman penulis yang pernah lakukan.

Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua Universitas

Brawijaya Press

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kesiapan PTKIS setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapan PTKIS Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, untuk mengetahui apakah PTKIS telah memahmi konsep pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapinya dalam rangka pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pendekatan wawancara dilakukan dengantahapan-tahapan, yaitu: menggunakan petunjuk umum wawancara dan model wawancara baku terbuka, dan mengambil lokasi di 24 PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten. Fokus penelitian ini adalah kesiapan PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, sumber data penelitian ini adalah Perangkat PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten belum melaksanakan konsep pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah secara penuh karena hal itu belum dilaksanakan oleh PKIS secara maksimal dan optimal sehingga dalam implementasinya pun belum mencapai hasil yang optimal, konsep tersebut perlu didukung oleh lima aspek yang menjadi indikator kesiapan Institusi PTKIS yaitu: (1) aspek kewenangan yang wajib untuk dilaksanakan, (2) aspek desain

organisasi yang berimplikasi terhadap profesionalisme kerja, (3) aspek daftar kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan program, (4) aspek kebutuhan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang pelaksanaan program, (5) aspek perencanaan biaya yang matang minimal. Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PTKIS Kopertais Wilayah II Jabar-Banten dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, belum siap dan belum mendukung, dikarenakan masih rendahnya kemampuan SDM dalam hal pengeolaan program, sebagai kendala untuk mencapai hasil yang optimal dan maksimal dalam rangka pelaksanaan Lima aspek yang menjadi indikator pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, walupun disisi lain etos kerja aparatur/pelaksana sangat tinggi. Agar aparatur PTKIS siap dalam pelaksanaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, maka penelitian ini merekomendasikan agar setiap PTKIS membuat rincian kewenangan dan melaksanakan yang wajib untuk dilaksanakan, setiap perangkat PTKIS bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang berpedoman pada desain organisasi yang ada, setiap perangkat menyusun daftar kebutuhan dalam pelaksanaan program serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program sesuai dengan proporsi dana yang tersedia, dan setiap perangkat hendaknya menyusun perencanaan biaya atau estimasi biaya secara matang sebelum membuat dan melaksanakan program.

Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan

MediaPressindo

Administrasi adalah ilmu yang mempelajari negara serta kepentingan publik serta dituntut bertanggung jawab terhadap

publik yang dilayaninya. Birokrasi publik pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Tetapi faktanya, banyak birokrat pemerintah yang tidak memiliki kompetensi dan akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Birokrasi adalah lembaga yang paling banyak di sorot oleh masyarakat terkait dengan kinerja dan etika. Perhatian masyarakat ditujukan pada praktik yang menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini menunjukkan pentingnya etika dalam administrasi publik. Etika dan tingkah laku manusia saling berkaitan sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan Publik di Indonesia

Tanjungpura University Press

Kegagalan Indonesia memutus warisan kolonial dalam kehidupan birokrasi pemerintah telah ikut membentuk sosok birokrasi dan aparatur yang gagal mentransformasi dirinya sebagai agen pelayanan dan perubahan.

Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakad Media Publishing

Setelah kurang lebih satu tahun buku ini diterbitkan,

Alhamdulillah buku ini dicetak ulang. Penulis bersyukur bahwa gagasan yang disam paikan dalam buku ini memperoleh sambutan yang baik dari para maha siswa, pemerhati, dan pakar adrnistrasi publik. Ketika buku ini dicetak ulang penulis mencoba memperkaya pembahasan berbagai isu yang ada di Bab I Mengembangkan Sistim Pelayanan Publik Dalam Negara Kesa tuan Yang Desentralistik dan Bab V Manajemen Kolabatif: Kemitraan Antara Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah.

Sedangkan Bab-Bab lainnya tidak mengalami perubahan. Revisi Bab I dilakukan untuk memperkaya analisis penulis tentang pembagian urusan pemerintahan terkait dengan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian urusan pemerintahan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kerancuan pembagian urusan antara susunan pemerintahan menjadi salah satu sumber masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Perubahan dalam Bab ini dilakukan untuk memperjelas pendapat penulis mengenai bagaimana seharusnya pembagian urusan dalam penyelenggaraan pelayanan dilakukan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan. Perubahan juga dilakukan dalam diskusi tentang standar pelayanan mini mal (SPM). Dalam revisi ini penulis menambahkan penjelasan tentang berbagai sumber kegagalan implementasi SPM dan bagaimana seharusnya perbaikan substansi dan strategi implementasi SPM dilakukan. Revisi Bab V dilakukan untuk menambah penjelasan tentang pengembangan manajemen kolaboratif, yang didalam edisi yang pertama masih sangat minimal. Dalam edisi kedua ini penulis menambahkan penjelasan tentang bagaimana pemerintah dan manajer sektor publik seharusnya memilih mitra kerjasama.

Kinerja pengawasan DPRD Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Buku ini dibagi dalam empat bagian, yaitu pengantar, dua bab, dan penutup. Dalam pengantar telah ditetapkan masalah atau problem yang perlu dipecahkan. Dalam Bab 1 dibahas hubungan antara teori dan praktek, yaitu di satu pihak hubungan antara

administrasi pembangunan (praktek), dan di pihak lain ilmu Administrasi Pembangunan (teori). Kemudian dalam Bab 2 diterangkan metode penelitian ilmiah yang harus dipakai dalam ilmu-ilmu sosial untuk dapat menghasilkan jenis pengetahuan ilmiah spesifik yang diperlukan itu. Kemudian dalam penutup, akhirnya dinilai kembali hasil (result) yang diperoleh dari upaya memecahkan masalah yang bersangkutan. Sebagai petunjuk untuk pembaca buku ini, barangkali berguna untuk diketahui bahwa pembagian ke dalam empat bagian tersebut berdasar logika pendekatan proses pemecahan masalah yang disajikan.

Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara Nas Media Pustaka

Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah ketentuan pengaturan lembaga perbedaan pendapat yang sangat berlainan dengan ketentuan dalam perundangan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan ini selanjutnya menyebutkan bahwa jika dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Buku ini berasal dari hasil penelitian penulis dan beberapa tulisan yang telah dipublikasi di jurnal, kemudian dilengkapi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Tujuan penulisan buku ini adalah membahas tentang perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam putusan, khususnya berkaitan dengan

perkara perdata dan pidana di pengadilan negeri. Pembahasan dalam buku ini meliputi pengadilan negeri dalam sistem kekuasaan kehakiman, pemeriksaan perkara perdata, pemeriksaan perkara pidana, tinjauan umum tentang perbedaan pendapat dan praktik penerapan perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana di pengadilan negeri. Oleh karena itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum pada program S-1 dan S-2, akademisi, para praktisi hukum, serta siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana di pengadilan negeri. Buku persembahkan penerbit MediaPressindogroup **Petskha vai** CV. cahaya Arsh Publisher & Printing

Ketertarikan penulis untuk menulis buku dengan judul Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik – Edisi Revisi ini berawal dari ranah administrasi publik sangat luas, kompleks, dan dinamis telah menimbulkan kesulitan amat besar untuk membangun teori tunggal sebagai satu-satunya teori yang mampu memberikan deskripsi dan eksplanasi yang komprehensif dan akurat terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Kondisi ini akhirnya mendorong berkembangnya aneka ragam metodologi (pendekatan) dalam administrasi publik. setiap pendekatan dan teori, pada dasarnya merupakan hasil derivasi dari meta-teori yang melandasinya. Teori baru timbul sebagai hasil derivasi dari landasan meta-teori yang berbeda dengan teori lama sehingga perubahan dari teori satu ke teori berikutnya, seperti ditegaskan Thomas Khun, tidak sekedar bersifat revolusioner kumulatif tetapi justru lebih bersifat revolusioner paradigmatic.

KESIAPAN PTKIS Shadow PlayInformation Politics in Urban Indonesia

Human Resource Management dapat didefinisikan sebagai manajemen yang efektif dari orang-orang dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan dan tujuan strategis organisasi. Selain itu, tim manajemen sumber daya manusia yang efisien dapat memberikan keunggulan bagi perusahaan dalam persaingan.

Gramedia Pustaka Utama

Berangkat dari pengalaman mengajar di kelas pada saat kuliah Metodologi Penelitian khususnya, selalu saja kekurangan waktu untuk menjelaskan materi kuliah yang bersangkutan, sementara disisi lain masih banyak materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa, sehingga akhirnya dosen harus memilih apakah memilih materi yang disampaikan sedikit tetapi mahasiswa memahami semua yang disampaikan, atau memilih menyampaikan semua materi, tetapi konsekuensinya mungkin banyak mahasiswa yang tidak faham. Untuk itu adanya Buku Ajar ini sedikit dapat membantu dosen dan mahasiswa untuk menemukan jalan tengah, artinya tidak semua materi harus disampaikan dikelas, bagian dari materi yang kira-kira bisa difahami oleh mahasiswa hanya dengan membaca sendiri, maka dapat hanya dengan membaca di Buku Ajar ini, dengan demikian semua materi yang sudah direncanakan oleh dosen di 14 kali pertemuan per semester tersebut dapat disampaikan semua dengan tuntas. Sebagai pengayaan tambahan maka di kelas, perlu dibuka “ruang” diskusi bagi mahasiswa yang belum faham setelah membaca Buku Ajar ini. Buku Ajar ini coba penulis

tuliskan dengan menggunakan Bahasa “kampung” tujuannya adalah agar apa yang ditulis dalam buku ini mudah difahami oleh siapa saja. Disamping itu berbagai materi yang ditulis dalam Buku Ajar ini adalah kombinasi teori dan praktik, sehingga isi buku ini lebih mengarah kepada pragmatis, khususnya dalam konteks penelitian akademik (Skripsi, Tesis dan Disertasi). Akhir kata, karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis, khususnya dalam bidang ilmu Metodologi Penelitian, maka buku ini tentu masih jauh dari sempurna seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak, untuk itu segala kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangatlah penulis diharapkan guna penyempurnaan buku ini dimasa yang akan datang. Pontianak, Desember 2019 Penulis

Administrasi Publik dan Inovasi Birokrasi : Sebuah Pengantar FISIP 20

Function of adat council in solving land dispute cases of Walsa

ethnic group in Papua, Indonesia.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
Deepublish

"DR.Ir.H.Fadel Muhammad berhasil membumikan teori-teori penyelenggaraan pemerintahan yang rumit ke dalam praktik dengan logika dan tindakan yang mudah dipahami. Provinsi Gorontalo adalah laboratorium tempat dirinya melakukan eksperimen untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang unggul. Ia mencermati variabel-variabel yang diduga memengaruhi kinerja, antara lain karakteristik daerah, budaya organisasi, dan kapasitas manajemennya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) esis dan semakin kuat jika pemerintah daerah inovatif, kreatif, produktif, dan saling memanfaatkan keunggulan lokal dengan jejaring yang sehat antardaerah. NKRI tidak mungkin dibangun dari Jakarta. -Dr.H.Jusuf S.K, Wali kota Tarakan/Ketua APEKSI"